

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pembahasan pada bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka sebagai landasan kerangka pemikiran dan hipotesis. Dalam melaksanakan penelitian sebuah pemahaman tentang penelitian yang akan dilakukan dinilai sangat penting. Sehingga dalam pembahasan permasalahan Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Bantuan Sosial, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Umur Harapan Hidup Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Membutuhkan teori yang relevan dengan penelitian.

2.1.1 Kemiskinan

2.1.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan juga merupakan suatu permasalahan yang tidak hanya dialami oleh negara berkembang namun juga dialami oleh negaranegara maju. Menurut Ritonga dalam Ndaru et al., (2018) kemiskinan merupakan kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, sandang, papan dan kebutuhan sosial. Menurut Mudrajad (2013) kemiskinan terjadi karena sumber daya manusianya yang rendah dan, akses kegiatan perekonomian

yang belum maksimal, dan belum meratanya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Kemiskinan memberikan merupakan kondisi serba kekurangan seperti minimnya kepemilikan modal, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya tingkat penghasilan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan minimnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan.

Sukiyono et al., (2019) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah utama yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang. Negara yang dapat dinilai sebagai negara berkembang dapat dilihat dari tingkat pengetahuan dan teknologi yang dikuasai masyarakat, angka pengangguran yang tinggi, serta rendahnya tingkat pendapatan perkapita. Negara berkembang harus dapat berupaya ekstra dalam pengentasan tingginya tingkat kemiskinan, salah satunya negara Indonesia.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, Menurut Suryawati dalam Jacobus et al., (2019) kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut Adalah:

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah:

1) Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan pra sarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

2) Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (*developmentalism*) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

2.1.1.2 Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan kemiskinan. Adapun penyebab terjadinya kemiskinan menurut Kuncoro dalam Saputra (2011) sebagai berikut:

- 1) Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan

timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.

- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
- 3) Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal.

2.1.1.3 Teori Kemiskinan

Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Cycle of Poverty*) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan siklus berulang, di mana individu atau komunitas yang hidup dalam kemiskinan cenderung tetap berada dalam kondisi tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya penting, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan sarana peningkatan produktivitas (Sri Wahyuni & Prima Putra, 2025). Teori ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse mengatakan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pembangunan di masa lalu. Namun, kemiskinan juga menjadi penghambat pembangunan di masa yang akan datang.

Nurkse (1953) mengemukakan teori mengenai kemiskinan yang dinamakan teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*) Ragnar Nurkse yang menyatakan bahwa adanya suatu lingkaran setan kemiskinan atau *vicious circle* yang menyebabkan suatu daerah miskin akan tetap miskin. Teori Lingkaran Kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse ini menggambarkan sebuah siklus yang sulit diputus, di mana kemiskinan akan terus berputar dan memperparah kondisi suatu negara (Adelya et al., 2025). Menurut Ragnar Nurkse teori tersebut

merupakan serangkaian daya yang saling memengaruhi, alhasil menghadirkan kondisi masalah guna terwujudnya pembangunan yang makin meningkat pada suatu negara khususnya negara berkembang. Nurkse mengemukakan bahwa adanya keterbelakangan dan ketidaksempurnaan pasar maka mengakibatkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan pendapatan menurun sehingga tabungan dan investasi berkurang. Kurangnya investasi mengakibatkan kurangnya modal untuk menghasilkan produktivitas. Konsep lingkaran kemiskinan menganggap bahwa suatu Negara yang mengalami kondisi kemiskinan secara terus menerus disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan baik.
2. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan produktivitas rendah.
3. Kurangnya faktor pendukung kegiatan penanaman modal.

2.1.2 Ketimpangan Pendapatann

2.1.2.1 Pengertian Ketimpangan Pendapatan

Menurut Todaro & Smith (2012) ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional diantara masyarakat. Ketimpangan ekonomi menjadi salah satu perhatian pemerintah. Ketimpangan ekonomi merupakan permasalahan yang kompleks karena disebabkan oleh berbagai aspek (*World Bank*, 2016)

Kondisi ketimpangan pendapatan yang terjadi menimbulkan perbedaan pendapatan yang timbul akibat adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya

dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal. Karakteristik suatu daerah berpengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi. Ketidakseragaman ini memiliki pengaruh terhadap kemampuan untuk daerah untuk tumbuh yang mengakibatkan beberapa daerah mampu untuk tumbuh dengan cepat namun beberapa daerah lainnya sebaliknya.

Menurut Dumairy dalam Jacobus et al., (2019) distribusi pendapatan dalam kaitannya dengan pemerataan pembagian pendapatan, dapat dilihat dari segi :

1. Distribusi pendapatan antar lapisan pendapatan masyarakat
2. Distribusi pendapatan antar wilayah, dalam hal ini antar provinsi dan antar kawasan (barat, tengah, timur)
3. Distribusi pendapatan antar daerah, dalam hal ini antar wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan.

Indikator sebagai pengukuran ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini. Todaro & Smith (2012) menyatakan bahwa Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Menurut Muta'Ali (2015) menjelaskan bahwa semakin mendekati nilai 0, distribusi pendapatan semakin merata, sedangkan semakin mendekati nilai 1 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi. Menurut Todaro (2012) ada tiga kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan indeks gini yaitu:

- 1) Tingkat ketimpangan tinggi: lebih dari 0,5
- 2) Tingkat ketimpangan sedang: antara 0,35-0,5
- 3) Tingkat ketimpangan rendah: kurang dari 0,35

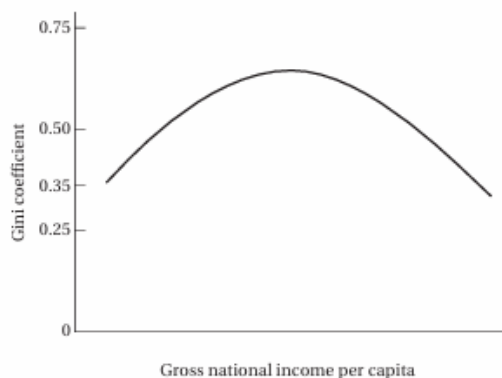
Menurut Sjafrizal (2008) Faktor-faktor penyebab ketimpangan pendapatan antar wilayah menurut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Perbedaan kandungan sumber daya alam
- 2) Perbedaan kondisi demografis
- 3) Kurang lancarnya mobilitas dan jasa
- 4) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah
- 5) Alokasi pembangunan antar wilayah

2.1.2.2 Teori Ketimpangan Pendapatan

Menurut Kuznets dalam Kuncoro (2006) ekonom klasik melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di negara negara miskin pada awalnya cenderung menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Namun, ketika negara Negara miskin tersebut menjadi lebih maju, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan akan berkurang (pola berbentuk U terbalik). Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya, sehingga sering dikenal kurva “U-terbalik”. Pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi, sehingga ketimpangan dan kemiskinan cenderung meningkat. Seiring dengan meningkatnya tingkat pembangunan, kesempatan kerja dan akses ekonomi menjadi lebih luas, yang memungkinkan kelompok berpendapatan rendah ikut menikmati hasil pertumbuhan. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu

mendorong pemerataan pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan.. Bentuk kurva U-terbalik dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Todaro 2012

Gambar 2. 1 kurva U-terbalik

Kurva U-terbalik Kuznets menurut Todaro dalam Yuliani (2015) kurva Kuznets dalam jangka pendek menggambarkan korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan, artinya pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan peningkatan ketimpangan pendapatan. Namun dalam jangka panjang keduanya menjadi korelasi negatif, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan penurunan ketimpangan pendapatan.

Dengan demikian, hipotesis Kuznets menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang dinamis dengan ketimpangan pendapatan, di mana pada tahap awal pembangunan pertumbuhan cenderung meningkatkan ketimpangan, namun pada tahap selanjutnya pertumbuhan justru dapat menurunkan ketimpangan. Pola ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak langsung terhadap kesejahteraan kelompok miskin, karena dampaknya sangat bergantung pada bagaimana hasil pertumbuhan tersebut terdistribusi dalam masyarakat.

Menurut Francois Bourguignon dalam Schwager (2019) mempopulerkan apa yang disebutnya sebagai *Poverty–Growth–Inequality Triangle* (PGI) Model ini dimaksudkan untuk membenarkan, dan menguraikan gagasan bahwa perubahan kemiskinan dalam suatu ekonomi dapat sepenuhnya ditentukan oleh perubahan pertumbuhan pendapatan dan perubahan distribusi pendapatan. Kerangka ini menjelaskan bahwa perubahan tingkat kemiskinan dalam suatu perekonomian ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu pertumbuhan pendapatan rata-rata dan perubahan distribusi pendapatan (ketimpangan). Dalam kerangka PGI, pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan, namun besarnya penurunan tersebut sangat bergantung pada tingkat ketimpangan yang ada.

Bourguignon menegaskan bahwa pertumbuhan dan ketimpangan tidak hanya memengaruhi kemiskinan secara langsung, tetapi juga saling berinteraksi satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan lebih efektif menurunkan kemiskinan apabila disertai dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Sebaliknya, apabila pertumbuhan diikuti dengan peningkatan ketimpangan, maka dampaknya terhadap penurunan kemiskinan menjadi lebih kecil.

2.1.3 Belanja Bantuan Sosial

2.1.3.1 Pengertian Belanja Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.81/Pmk.05/2012, belanja bantuan sosial adalah transfer uang, barang, atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan risiko sosial dan meningkatkan kapasitas ekonomi serta kesejahteraan. Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk belanja

yang berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan barang dan uang yang dianggarkan untuk mendukung lembaga dan pemerintah guna mengurangi tingkat kemiskinan (Triyulianto et al., 2024)

Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan untuk memberikan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial guna mencapai kemandirian. Bentuk belanja bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial konsumtif, bantuan sosial produktif, dan bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga tertentu. Belanja bantuan sosial konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat sebagai jaring pengaman sosial. Belanja bantuan sosial yang bersifat produktif ditujukan untuk membantu permodalan masyarakat ekonomi lemah. kebijakan pemerintah yang berfokus pada alokasi dana guna bansos akan memberikan dukungan langsung guna masyarakat rentan dan miskin, pada akhirnya dapat menolong masyarakat yang miskin guna dapat keluar dari kemiskinan atau setidaknya dapat mengurangi dampaknya (Aliyah & Bahtiar, 2025)

Menurut Rahmansyah et al., (2020) tujuan pemanfaatan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015) Pasal 4 huruf a Nomor 254/PMK.05/2015 meliputi:

- a) Perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal;

- b) Rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar;
- c) Jaminan sosial, yang merupakan suatu skema yang dilembagakan untuk menjamin agar setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak;
- d) Pemberdayaan sosial, yang merupakan segala upaya yang ditujukan agar warga masyarakat yang mengalami masalah sosial memiliki daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- e) Penanggulangan kemiskinan, yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau tidak mempunyai sumber penghidupan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang layak bagi kemanusiaan;
- f) Penanggulangan bencana, yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko terkena bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

2.1.3.2 Teori Belanja Bantuan Sosial

Kondisi sejahtera biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Teori pembangunan sosial Menurut Midgley (1995) kesejahteraan sosial didefinisikan

sebagai “*a condition or state of human well-being*”. Kondisi sejahtera terjadi saat kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar seperti gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi. Kesejahteraan sosial dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu, kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu. Menurut Suharto dalam Suradi (2007) pembangunan kesejahteraan sosial usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Atau dalam pengertian kemajuan yang dicapai oleh masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Menurut Dunham dalam Soetarso (1980) bahwa kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Kemudian Friedlander dalam Soetarso (1980) menggabungkan pelayanan sosial dan lembaga sosial dalam pengertian kesejahteraan sosial, yaitu sistem terorganisasi dari pelayanan dan lembaga sosial yang dimaksudkan untuk membantu perorangan dan kelompok untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan sosial dan pribadi yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan sepenuhnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka serasi dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

2.1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

2.1.4.1 Pengertian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja menurut Kuncoro dalam Sianturi et al., (2024) adalah jumlah total tenaga kerja yang ada dalam suatu perekonomian pada saat tertentu. Orang yang bekerja dan orang yang mencari pekerjaan membentuk angkatan kerja. Mereka yang bersekolah, yang mengurus rumah tangga dan kelompok orang lain yang mendapat uang sekarang sudah tidak bekerja. Penduduk usia kerja yang bekerja atau yang mempunyai pekerjaan tetapi mengganggur sementara dan sedang mencari pekerjaan dapat disebut juga sebagai angkatan kerja.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat, yang termasuk dalam definisi tenaga kerja yaitu penduduk yang sudah atau sedang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan dan mereka yang melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Sedangkan menurut ILO (*International Labour Organization*) tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang berusia antara 15-64 tahun. Sedangkan angkatan kerja terdiri dari individu yang saat ini sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja namun secara aktif mencari kerja, adapun yang dimaksud dengan populasi usia kerja yaitu mencakup individu berusia 15-64 tahun. Menurut Mankiw (2006) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk dewasa yang berada dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat didefinisikan sebagai ukuran proporsi populasi manusia kerja

suatu negara atau mencari pekerjaan. Ini memberikan indikasi ukuran pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa, relatif terhadap populasi pada usia kerja. TPAK menghitung jumlah orang dalam angkatan kerja sebagai persentase dari penduduk usia kerja.

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2024) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah/negara. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*Labor Supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, semakin besar populasi yang berkontribusi terhadap perekonomian.

2.1.4.2 Teori Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Teori *Labor Theory of Value* Adam Smith, sebagai tokoh ekonomi klasik, menyatakan bahwa pertumbuhan kekayaan suatu negara bergantung pada keterampilan tenaga kerja yang digunakan. Ia berpendapat bahwa sumber utama pendapatan berasal dari hasil produksi tenaga kerja dan pemanfaatan sumber daya ekonomi. Tingginya nilai suatu barang ditentukan oleh keunggulan mutlak yang dimilikinya. Keunggulan mutlak, menurut Smith, mengacu pada kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dengan memanfaatkan teknologi serta efisiensi tenaga kerja. Dalam teorinya yang dikenal sebagai *Labor Theory of Value*, ia menjelaskan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang terlibat dalam produksi, semakin tinggi pula nilai barang yang dihasilkan. Kemakmuran suatu negara diukur

berdasarkan jumlah barang yang diproduksi, di mana proses produksi tersebut memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar (Anggoro & Soesatyo, 2015)

2.1.5 Umur Harapan Hidup

2.1.5.1 Pengertian Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat hidup oleh seorang individu sejak lahir, berdasarkan kondisi kesehatan, lingkungan, dan tingkat kematian saat ini di suatu populasi. Indikator ini sering digunakan untuk menilai kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dalam suatu negara atau wilayah. Umur harapan hidup dapat berbeda-beda berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, status ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan, gizi, dan faktor-faktor sosial lainnya (*World Health Organization*, 2019). Definisi kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian kesehatan selain sebagai hak asasi manusia juga merupakan sebuah investasi bagi masyarakat”. Kesehatan merupakan modal yang penting dalam menciptakan peluang-peluang untuk mampu beraktivitas secara normal. Kondisi kesehatan yang baik dapat menjamin manusia dalam melakukan berbagai kegiatan pada kehidupan sehari-harinya. Menurut BPS, pembangunan manusia yang komprehensif pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatan manusia secara merata. Namun hal ini tampaknya masih menjadi persoalan klasik di tingkat kota/kabupaten.

2.1.5.2 Teori Umur Harapan Hidup

Teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh Becker dalam Ramadanisa & Triwahyuningtyas (2022) menyatakan jika manusia bukan sekedar sumber daya tetapi dapat berbentuk modal. Modal manusia sangat penting yang dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek pendapatan, kesehatan, pendidikan, atau dengan adanya kebiasaan baik yang terus bertambah di kehidupan untuk menunjang produktivitasnya. Beberapa hal tersebut dapat disebut sebagai modal manusia dikarenakan manusia tidak dapat terpisahkan oleh pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan juga nilai-nilai lain yang berhubungan dengan keuangan dan fisik mereka. Menurut Becker, Modal manusia mengacu pada cadangan keterampilan dan pengetahuan produksi manusia melalui kesehatan dan pendidikan. Tingginya tingkat pendidikan dan kesehatan seseorang, menggambarkan semakin tingginya modal manusia yang diharapkan. Jika investasi dalam modal manusia meningkat, individu memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan.

Indikator yang dipakai untuk mengukur kemajuan pembangunan kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia. Dalam kerangka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UHH memainkan peran yang sangat penting karena menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan (Muliana Padang et al., 2025).

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengenai Gini Ratio, Belanja Bantuan Sosial, Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja, dan Umur Harapan Hidup Terhadap Kemiskinan.

Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aliyah & Bahtiar (2025) Pengaruh Bantuan Sosial, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2018-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Belanja Bantuan Sosial	• Ketimpangan Pendapatan • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja • Umur Harapan Hidup	Bantuan sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.	Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN) Volume 05 Nomor 02 Tahun 2025 (Online) 2723-813X 1 (Print) 2723-8121
2	Alfath (2025) Pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Subsidi, Dan Dana Hibah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara.	Belanja Bantuan Sosial	• Ketimpangan Pendapatan • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja • Umur Harapan Hidup	Bantuan sosial berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.	Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol.5, No.1, Desember 2025
3	Putra & Yulianti (2025) Mengukur Pengaruh Kapasitas Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat	Belanja Bantuan Sosial	• Ketimpangan Pendapatan • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja • Umur Harapan Hidup	Belanja bantuan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Sumatera Barat.	Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 5, No 2, 2025, Page: 1-10 e-ISSN 2798-8260

No	Peneliti, Tahun, Judul, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Melalui Belanja Bantuan Sosial				
4	Putri Aulia Husain et al., (2025) Pengaruh Pemanfaatan Program Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan di Desa Pelita Hijau Kabupaten Bone Bolango.	Belanja Bantuan Sosial	• Ketimpangan Pendapatan • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja • Umur Harapan Hidup	Bantuan Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.	Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 3, Nomor. 2, Mei 2025e-ISSN : 3031-3406, p-ISSN: 3031-3414, Hal. 19-33
5	Mirah et al., (2020) Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	• Ketimpangan Pendapatan • Beantuan Sosial • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja • Umur Harapan Hidup	Tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara.	Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah Vol 21, No 1 (2020) ISSN Online : 2685-3183
6	Fitria & Diana Novita, (2024) Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	• Ketimpangan Pendapatan • Bantuan Sosial • Umur Harapan Hidup	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berpengaruh Positif Dan Tidak Signifikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Aceh.	Journal Transformation Of Mandalika E-Issn: 2745-5882, P-Issn: 2962-2956hh.433-439
7	Sihite et al., (2024) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	• Ketimpangan Pendapatan • Bantuan Sosial	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mempunyai dampak negatif dan signifikan di Kabupaten	Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE), Desember 2024 ISSN 2985-4652

No	Peneliti, Tahun, Judul, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan.		Umur Harapan Hidup	Humbang Hasundutan	
8	Fransiska Vistalia Alo & I Wayan Sukadana (2025) Analisis Pengaruh Pertumbuhan penduduk, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	- Ketimpangan Pendapatan - Bantuan Sosial - Umur Harapan Hidup	Tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.	E-Jurnal EP Unud, 12[11]: 736-747 ISSN: 2303-0178
9	Christy et al., (2024) Analisis Pengaruh Antara Pendidikan, Kesehatan, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	- Ketimpangan Pendapatan - Bantuan Sosial - Umur Harapan Hidup	Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur.	Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober 2024, 10(19), 678-688 p - ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
10	Zendrato et al., (2025) Analysis Of Factors Affecting	Umur Harapan Hidup.	- Ketimpangan Pendapatan - Bantuan Sosial	The results indicate that health, per capita expenditure, labor force, and	Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol. 8.

No	Peneliti, Tahun, Judul, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Poverty In Indonesia.		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	communication expenditure have a negative and significant effect on poverty. Conversely, population density, inflation, and the lag of poverty have a positive and significant effect on poverty in Indonesia	No. 3 (2025) e-ISSN: 2621-606X Page: 11432-11449.
11	Agung & Budiarti, (2022) Determinan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020.	Umur Harapan Hidup	- Ketimpangan Pendapatan - Bantuan Sosial - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Umur harapan hidup berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta.	Seminar Nasional Official Statistics 2022 (1):343-352 DOI:10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1435
12	Muliana Padang et al., (2025) Pengaruh Usia Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Pakpak Bharat.	Usia Harapan Hidup	- Ketimpangan Pendapatan - Bantuan Sosial - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Usia harapan hidup punya dampak negatif tapi tidak signifikan pada kemiskinan.	Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Vol.3, No.11 November 2025 e-ISSN: 3025-7859; p-ISSN: 3025-7972, Hal 389-397 DOI: https://doi.org/10.61722/jiem.v3i11.7093
13	Okta Aking Dwi Padmono, (2025) Pengaruh Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia	Ketimpangan Pendapatan	- Bantuan Sosial - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan,	Journal Economic Excellence Ibnu Sina Volume. 3, Nomor. 3 September 2025 e-ISSN: 3025-2156; p-

No	Peneliti, Tahun, Judul, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	terhadap Kemiskinan		• Umur Harapan Hidup		ISSN: 3025-2148, Hal. 306-319
14	Baiquni & Feriyanto, (2025) Analisis Pengaruh Usia Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat	Usia harapan hidup	• Ketimpangan Pendapatan • Bantuan Sosial • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Usia Harapan Hidup memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan	Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Volume 4 Issue 1, 2025: 1-10
15	Prasetya (2024) Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Usia Harapan Hidup Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Setiap Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.	Umur Harapan Hidup	• Ketimpangan Pendapatan • Bantuan Sosial • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Umur Harapan Hidup memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin	Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian (EJPP) E-ISSN: 2747-0369, P-ISSN: 2746-7538 Volume 4, Nomor 2, Mei 2024
16	Eva Safrinja et al., (2024) Analisis Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh	Ketimpangan Pendapatan	• Bantuan Sosial • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja • Umur Harapan Hidup	Ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.	Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Volume. 3, Nomor. 1, Tahun 2025 e-ISSN : 3031-3406, dan p-ISSN: 3031-3414, Hal. 119-132

No	Peneliti, Tahun, Judul, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Putri et al., (2025) The Impact Of social Assistance And Capital Expenditure On Poverty Levels In Aceh Province	Bantuan Sosial	• Ketimpangan Pendapatan • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja • Umur Harapan Hidup	The results indicate that social assistance has a negative and has no significant partial effect on poverty reduction	JUTIN: Jurnal Teknik Industri Terintegrasi Volume 8 Issue 12025, Page 550-558 ISSN:2620-8962(Online)
18	Langoday & Man, (2024) The Role SOF Population Growth, Education Level, Labor Force Participation Rate on Poverty Level In Indonesia	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	• Ketimpangan Pendapatan • Bantuan Sosial • Umur Harapan Hidup	Based on the results of data processing and simultaneous testing, it shows that, The labor force participation rate has a negative and significant effect on poverty.	Journal of Law and Sustainable Development, 12(2), e3011. https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.3011
19	Tope et al., (2025) Impact of Gini Ratio, Economic Growth and Unemployment on Poverty Levels: A Panel Data Analysis	Ketimpangan Pendapatan	• Bantuan Sosial • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja • Umur Harapan Hidup	The findings reveal that, collectively, income distribution, economic growth, and the open unemployment rate significantly influence poverty levels.	International Journal of Economics and Financial Issues ISSN: 2146-4138 available at http://www.econjournals.com
20	Septian & Suharianto, (2025) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Regional, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan di	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	• Ketimpangan Pendapatan • Bantuan Sosial • Umur Harapan Hidup	Tingkat partisipasi angkatan kerja yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan,	Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi Volume. 3 Nomor. 2 Maret 2025 e-ISSN: 3025-5899; p-ISSN: 3025-4728, Hal. 53-68

No	Peneliti, Tahun, Judul, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Sumatera Utara Tahun 2001-2023 Engko et al., (2024) Analisis Dampak Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Maluku	Bantuan Sosial	• Ketimpangan Pendapatan • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja • Umur Harapan Hidup	Belanja bantuan sosial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Maluku	Edunomika – Vol. 08, No. 01, 2024
22	Safitri & Susilo, (2024) Analisis Pengaruh Inklusifitas Keuangan Syariah, Pendidikan Dan Ketimpangan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun (2019-2023)	Ketimpangan Pendapatan	• Bantuan Sosial • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja • Umur Harapan Hidup	ketimpangan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.	Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 8(2), 265–288.
23	Novela Wenda et al., (2025) Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua	Ketimpangan Pendapatan	• Bantuan Sosial • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja • Umur Harapan Hidup	Ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.	Jurnal Ekonomi, Koperasi, & Kewirausahaan Volume 8 Januari 2025 p-ISSN: 2086-3306 e-ISSN 2809-8862
24	Putri & Effendi, (2021) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,	Bantuan Sosial	• Ketimpangan Pendapatan • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Belanja Bantuan Sosial memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan	JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 4 No. 2, 2021, hal 356-

No	Peneliti, Tahun, Judul, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Belanja Bantuan Sosial dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarmasin		Umur Harapan Hidup	terhadap tingkat kemiskinan	366ISSN 2746-3249

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk menyederhanakan fenomena yang diangkat serta keterkaitan antar variabel yang diteliti dalam tinjauan pustaka.

2.2.1 Hubungan Ketimpangan Pendapatan Dengan Kemiskinan

Dalam Hipotesis Kuznets, ketimpangan memiliki hubungan dinamis dengan pertumbuhan ekonomi, di mana pada tahap awal pembangunan pertumbuhan cenderung meningkatkan ketimpangan, namun dalam jangka panjang ketimpangan diharapkan menurun. kerangka *Poverty–Growth–Inequality Triangle* (PGI) dari Bourguignon menegaskan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan dan distribusi pendapatan secara simultan. Dengan demikian, semakin tinggi ketimpangan pendapatan, semakin besar kemiskinan tetap tinggi karena manfaat pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata kepada kelompok berpendapatan rendah. Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan tersebut secara kuantitatif, digunakan indikator yang dikenal sebagai Gini Ratio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah.

Penelitian yang dilakukan oleh Okta Aking & Dwi Padmono (2025) menunjukkan bahwa Gini Ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti peningkatan ketimpangan pendapatan secara nyata meningkatkan jumlah penduduk miskin. Temuan serupa juga diperoleh oleh Tope et al., (2025) yang menyimpulkan bahwa Gini Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, ketimpangan pendapatan yang tercermin melalui Gini Ratio memiliki peran signifikan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan. Ketimpangan yang tinggi menyebabkan manfaat pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata, sehingga kelompok masyarakat miskin semakin tertinggal dan kondisi kemiskinan menjadi semakin parah. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan kebijakan yang mampu menekan ketimpangan pendapatan agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.2.2 Hubungan Bantuan Sosial Dengan Kemiskinan

Teori pembangunan sosial oleh Midgley (1995) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai *“a condition or state of human well-being”*, yang menunjukkan bahwa kesejahteraan berkaitan dengan kondisi hidup manusia secara menyeluruh. Dalam konteks ini, bantuan sosial menjadi instrumen kebijakan publik untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat miskin. sebagaimana

ditegaskan Durham bahwa kesejahteraan sosial merupakan kegiatan terorganisasi untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, belanja bantuan sosial yang efektif dan tepat sasaran diharapkan mampu mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan akses terhadap layanan sosial.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alfath (2025) menemukan bahwa bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti peningkatan bantuan sosial mampu menurunkan jumlah penduduk miskin secara nyata. Sementara itu, penelitian Putri & Effendi (2021) menunjukkan bahwa bantuan sosial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa meskipun arah pengaruhnya menurunkan kemiskinan, efektivitas bantuan sosial masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti ketepatan sasaran dan besaran bantuan.

Berdasarkan teori dan temuan empiris tersebut, belanja bantuan sosial memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Bantuan sosial yang rendah atau tidak tepat sasaran berpotensi memperburuk kemiskinan karena kelompok miskin tidak memperoleh dukungan yang memadai. Sebaliknya, peningkatan belanja bantuan sosial yang dikelola secara efektif dan tepat sasaran diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar dan layanan sosial. Perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas implementasi kebijakan.

2.2.3 Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dengan Kemiskinan

Berdasarkan teori *Labor Theory of Value* yang dikemukakan oleh Adam Smith, tenaga kerja merupakan sumber utama penciptaan nilai dan pendapatan dalam proses produksi. Semakin besar keterlibatan tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi, semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan TPAK mencerminkan meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Septian & Suharianto (2025) menemukan bahwa TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti peningkatan partisipasi angkatan kerja mampu menurunkan jumlah penduduk miskin secara nyata. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Fransiska Vistalia Alo & I Wayan Sukadana (2025) TPAK yang menyimpulkan bahwa TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi, semakin rendah tingkat kemiskinan.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, TPAK memiliki peran penting dalam menekan tingkat kemiskinan. Peningkatan TPAK menunjukkan semakin luasnya kesempatan kerja dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif, sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan risiko kemiskinan menurun. Dengan demikian, kebijakan yang mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja, khususnya melalui penciptaan lapangan

kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja, diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

2.2.4 Hubungan Umur Harapan Hidup Dengan Kemiskinan

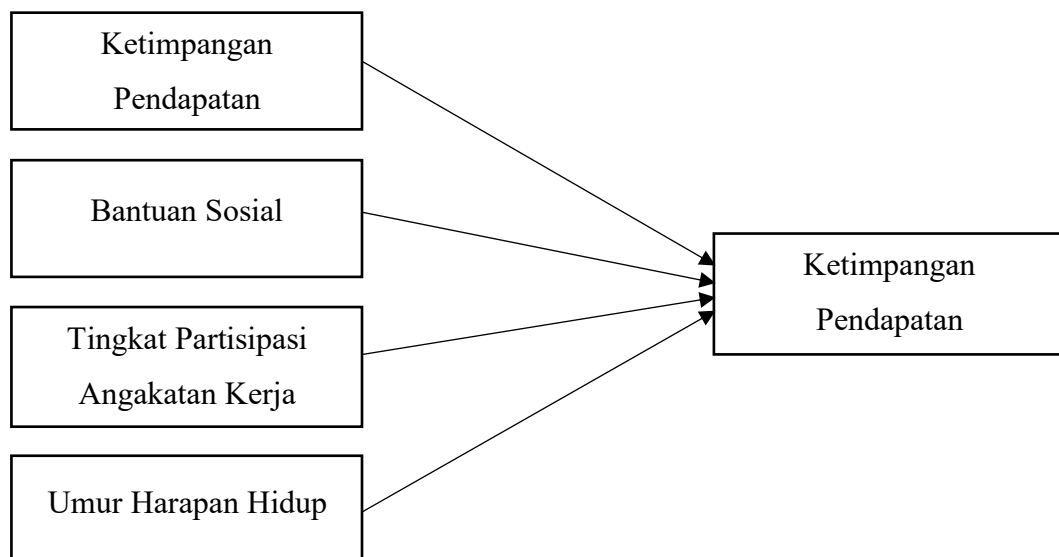
Berdasarkan teori *Human Capital Theory* yang dikemukakan Becker, manusia dipandang sebagai modal yang melekat pada pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Indikator yang dipakai untuk mengukur kemajuan pembangunan kualitas hidup manusia Adalah Indeks Pembangunan Manusia. Dalam kerangka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UHH menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan (Muliana Padang et al., 2025). Dengan demikian, peningkatan umur harapan hidup mencerminkan modal manusia yang lebih baik, sehingga memperbesar peluang individu untuk keluar dari kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetya (2024) menemukan bahwa umur harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti peningkatan kualitas kesehatan masyarakat mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara nyata. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Agung & Budiarti (2022) yang menyimpulkan bahwa umur harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat berperan penting dalam menekan tingkat kemiskinan.

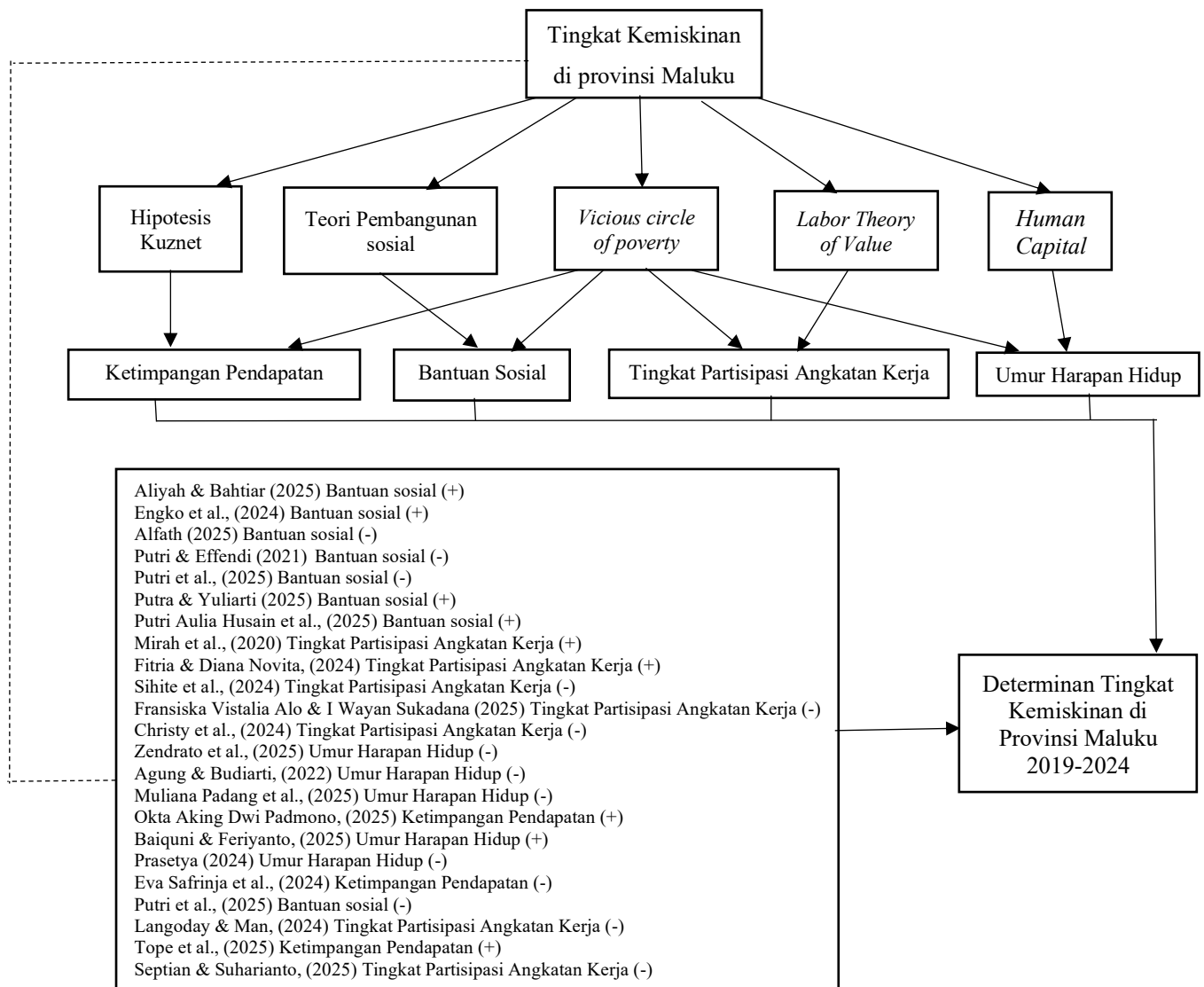
Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, umur harapan hidup memiliki peran penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Peningkatan

umur harapan hidup mencerminkan perbaikan kualitas kesehatan dan modal manusia, yang berdampak pada meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka pemikiran dan alur paradigma dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 3 Alur Paradigma Berpikir

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan perlu dibuktikan kebenarannya melalui pengujian. Secara umum, hipotesis harus melibatkan minimal satu variabel independent dan satu variabel dependen. Peneliti

merumuskan hipotesis berdasarkan hasil kajian teori yang telah dilakukan. adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Diduga secara parsial Ketimpangan Pendapatan berpengaruh positif, Sedangkan Belanja Bantuan Sosial, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Umur Harapan Hidup berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku tahun 2019-2024.
- b) Diduga secara bersama-sama Ketimpangan Pendapatan, Bantuan Sosial, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Umur Harapan Hidup Terbuka berpengaruh Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku tahun 2019-2024.